

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: APBD Perubahan 2018 Naik 4,02 Persen
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Sabtu, 29 September 2018

APBD Perubahan 2018 Naik 4,02 Persen

BANDUNG, (PR).-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 naik 4,02 persen. Total APBD Perubahan 2018 nilainya mencapai Rp 33,259 triliun dari total anggaran di APBD murni 2018 sebesar Rp 31,9 triliun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, prioritas program ditujukan untuk pembangunan yang dianggap strategis. Ia menyebutkan perlu dilakukan beberapa percepatan kegiatan.

"Untuk tender, segera disiapkan paket-paketnya. Jangan sampai terlambat. Prinsipnya efektivitas," kata Ridwan, dalam penyampaian pendapat akhir gubernur pada Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2018 di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro, Jumat (30/9/2018). Rapat dipimpin Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari.

Selain itu, Ridwan meminta serapan anggaran diselesaikan. Ia mengharapkan tidak ada penumpukan tagihan di akhir.

Secara terperinci, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar Iwa Karniwa mengatakan, APBD Perubahan 2018 yang baru disetujui DPRD tersebut mengalami peningkatan signifikan.

Peningkatan hingga 4,02% itu ditunjukkan oleh total APBD Perubahan 2018 yang nilainya mencapai Rp 33,259 triliun dari total anggaran di APBD murni 2018 sebesar Rp 31,9 triliun.

Iwa menyebutkan, kenaikan pendapatan disebabkan raihan positif pendapatan asli daerah yang naik sebesar Rp 1,23 triliun. Dalam APBD murni, nilainya Rp 17,58 triliun. Sementara dalam perubahan menjadi Rp 18,816 triliun. "Peningkatan ini disumbang dari pajak daerah sebesar Rp 1,159 triliun," ucapnya.

Iwa mengatakan, peningkatan itu merupakan kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar. Hal itu terkait program menggratiskan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan II atau kendaraan bekas yang memberi pemasukan cukup besar.

Dana perimbangan juga mengalami peningkatan dari Rp 14,34 triliun pada APBD murni menjadi Rp 14,379 triliun. Peningkatan ini pada dana alokasi umum yaitu dari Rp 2,879 triliun menjadi Rp 3,023 triliun. Iwa mengatakan, meskipun ada penurunan bagi hasil pajak, secara keseluruhan dana perimbangan meningkat Rp 34 miliar.

Pos pendapatan lain-lain yang sah juga mengalami peningkatan dari Rp 31 miliar menjadi Rp 63,7 miliar. Peningkatan karena Pemprov Jabar baru mendapat insentif sebagai daerah yang lima kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Kami mendapat Rp 33,7 miliar lebih," ujarnya.

Pada pos belanja daerah yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung juga ikut mengalami kenaikan. Pada APBD 2018, total belanja yang dianggarkan mencapai Rp 25,51 triliun, dalam perubahan menjadi Rp 27,153 triliun. Ada peningkatan belanja mencapai 6,1 persen lebih. Khusus belanja langsung dari Rp 8,44 triliun menjadi Rp 8,510 triliun atau ada peningkatan Rp 68 miliar.

Iwa mengatakan, tren belanja langsung dalam APBD 2019 akan meningkat. Pasalnya, kebijakan anggaran diarahkan untuk infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mendorong arus barang dan orang sehingga terjadi kapitalisasi ekonomi. Selain itu, dengan infrastruktur yang baik bisa menekan inflasi.

Iwa juga menjelaskan, dalam APBD Perubahan ada tambahan penyertaan modal di Bank BJB. Besaran modal yang akan ditambahkan mencapai Rp 88,2 miliar. **(Dewiyatini)*****